

## Tanggung Jawab Negara dalam Dinamika Politik Kewargaan di Desa (Study Kasus Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam Membangun Kepercayaan Publik)

Ully Rahmadiani<sup>1</sup>, Soimin<sup>2✉</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email✉ : [soimin@gmail.com](mailto:soimin@gmail.com)

---

Submitted: 2025-01-23; Accepted: 2025-09-28; Published: 2025-10-02

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa, dengan studi kasus inisiasi Pemerintah Desa Karang Asem, Kabupaten Indramayu, dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab negara, inisiatif pemerintah desa, dan dampaknya terhadap dinamika politik kewargaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara termanifestasi melalui penyediaan kerangka hukum, alokasi sumber daya, kapasitas pengembangan, serta pengawasan dan evaluasi. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem meliputi penerapan Sistem Informasi Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dampak positif terlihat dari peningkatan partisipasi politik warga, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kepercayaan publik, dan kemajuan desa yang tercermin dalam peningkatan Indeks Desa Membangun. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kesenjangan digital, upaya-upaya tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi warga di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab negara yang efektif, dikombinasikan dengan inisiatif lokal yang inovatif, dapat meningkatkan kualitas politik kewargaan dan pembangunan di tingkat desa.

**Kata Kunci:** *Kepercayaan Publik, Politik Kewargaan Desa, Tanggung Jawab Negara.*

---

### Abstract

This research examines the state's responsibility in the dynamics of civic politics in villages, with a case study initiated by the Karang Asem Village Government, Indramayu Regency, in building community trust. Using qualitative methods with a case study approach, this research analyzes forms of state responsibility, village government initiatives, and their impact on the dynamics of civic politics. The research results show that state responsibility is manifested through the provision of a legal framework, resource allocation, development capacity, as well as monitoring and evaluation. Karang Asem Village Government initiatives include implementing a Village Information System, increasing community participation in development planning, economic empowerment through BUMDes, and improving the quality of public services. Positive impacts can be seen from increasing citizen political participation, strengthening village community institutions, increasing public trust, and village progress as reflected in an increase in the Village Development Index. Although there are still challenges in overcoming the digital divide, these efforts have made a significant contribution to strengthening democracy and citizen participation at the village level. This research concludes that effective implementation of state responsibility, combined with innovative local initiatives, can improve the quality of civic politics and development at the village level.

**Keywords:** *Public Trust, State Responsibility, Village Citizenship Politics*

---

## PENDAHULUAN

Dinamika politik kewargaan di tingkat desa merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan antara warga negara dengan negara, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kewargaan politik yang ideal di tingkat desa, terutama terkait dengan tanggung jawab negara dalam memfasilitasi dan menjamin hak-hak politik warga desa. (Affandi, 2019)

Fenomena terbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan reformasi dan realitas implementasi otonomi desa. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur urusan pemerintahan, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023, dari 74.961 desa di Indonesia, sekitar 40% masih tergolong dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembangunan desa dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan otonomi desa. (Hanif, 2012)

Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dalam dinamika politik kewargaan di desa adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 45% warga desa yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah desa mereka. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 52%. Rendahnya kepercayaan masyarakat ini berpotensi menghambat partisipasi warga dalam pembangunan desa dan menciptakan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Di tengah situasi tersebut, muncul inisiatif-inisiatif dari beberapa pemerintah desa untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memperkuat kewargaan politik di tingkat lokal. Salah satu contoh yang menarik adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang Asem. Desa ini telah menerapkan berbagai program inovatif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam tata kelola desa. Inisiatif ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai kajian kasus yang dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana tanggung jawab negara dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa untuk memperkuat kewargaan politik. (Boangmanalu & Sembiring, 2022)

Namun, meskipun terdapat contoh-contoh positif seperti Desa Karang Asem, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami dinamika politik kewargaan di tingkat desa dan peran negara dalam memfasilitasinya. Sebagian besar studi yang cenderung fokus pada aspek-aspek formal dari otonomi desa dan implementasi kebijakan, namun kurang memberikan perhatian pada dimensi sosio-kultural dan relasional yang membentuk interaksi antara pemerintah desa dengan warganya. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana inisiatif-inisiatif lokal dalam membangun kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada kualitas politik kewargaan di desa.

Kesenjangan penelitian lainnya terletak pada kurangnya pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat. Studi-studi terdahulu cenderung melihat isu ini dari perspektif yang terbatas, seperti fokus pada aspek administrasi atau keuangan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang dapat mengintegrasikan berbagai dimensi, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dalam menganalisis dinamika politik kewargaan di desa. (Novianty, 2021)

Lebih lanjut, terdapat keselarasan dalam literatur mengenai bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks politik kewargaan di desa berinteraksi dengan inisiatif lokal dan kapasitas masyarakat. Meskipun banyak penelitian yang membahas peran negara dalam desentralisasi dan otonomi desa, masih sedikit yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana negara dapat secara efektif mendukung dan memperkuat inisiatif-inisiatif lokal tanpa mengurangi otonomi dan kreativitas masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa, dengan mengambil studi kasus inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam membangun kepercayaan masyarakat. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung dan memperkuat kewargaan politik di tingkat desa.
2. Mengevaluasi efektivitas inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas politik kewargaan.
3. Mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi inisiatif membangun kepercayaan masyarakat di tingkat desa.
4. Menganalisis interaksi antara kebijakan negara, inisiatif lokal, dan dinamika sosio-kultural dalam membentuk kewargaan politik di desa.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran negara dalam mendukung kewargaan politik yang sehat dan partisipatif di tingkat desa. (Manulang, 2021)

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas tanggung jawab negara dalam konteks politik kewargaan di desa. Studi kasus Desa Karang Asem akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana inisiatif lokal dapat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademis tentang politik kewargaan dan tata kelola desa, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendukung dan memperkuat demokrasi di tingkat desa.

Dengan mempertimbangkan urgensi isu ini dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan melengkapi literatur tentang kewargaan politik di tingkat desa dan peran negara dalam memfasilitasinya. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat desa dalam

merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.(Aris Riswandi Sanusi, 2016)

## **Kajian Teori**

### **1. Tanggung Jawab Negara**

Tanggung jawab negara merupakan konsep mendasar dalam hukum internasional dan ilmu politik yang mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warganya, menjamin kesejahteraan, dan memastikan terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Menurut Ian Brownlie, seorang ahli hukum internasional, tanggung jawab negara mencakup kewajiban untuk mencegah, menghentikan, dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.(Ariyanto, 2014)

Dalam konteks politik kewargaan di desa, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi dan memperkuat partisipasi warga dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert A. Dahl, seorang ilmuwan politik terkemuka, yang menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

Indikator tanggung jawab negara dalam konteks ini meliputi:

- a. Penyediaan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung otonomi desa
- b. Alokasi sumber daya yang memadai untuk pembangunan desa
- c. Pengembangan kapasitas aparatur desa
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
- e. Perlindungan hak- hak politik warga desa

### **2. Dinamika Politik Kewargaan**

Dinamika politik kewargaan Merujuk pada pola interaksi dan partisipasi warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Konsep ini erat kaitannya dengan teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya diskusi publik dan pertukaran argumen rasional dalam proses demokrasi.(Nurman1 & Prodi, 2014)

Dalam konteks desa, dinamika politik kewargaan mencerminkan bagaimana warga desa terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Menurut James C. Scott, seorang antropolog politik, dinamika politik di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan informal dan praktik-praktik budaya setempat.

Indikator dinamika politik kewargaan di desa meliputi:

- a. Tingkat partisipasiwarga dalam musyawarah desa
- b. Keaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa
- c. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa
- d. Kualitas musyawarah dalam pengambilan keputusan desa
- e. Tingkatkesadaran politik warga desa

### **3. Kepercayaan Publik (Kepercayaan Publik)**

Kepercayaan publik merupakan elemen krusial dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Robert D. Putnam, seorang sosiolog terkemuka, mendefinisikan kepercayaan publik sebagai keyakinan warga negara bahwa pemerintah akan

bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menjalankan fungsinya dengan efektif.(Sahuri, 2007)

Dalam konteks pemerintahan desa, kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi legitimasi dan efektivitas kebijakan desa. Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik, menekankan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dapat mengurangi biaya transaksi dalam interaksi sosial dan ekonomi, sehingga mendorong pembangunan yang lebih efisien.

Indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meliputi:

- a. Persepsi warga terhadap integritas aparatur desa
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik desa
- c. Keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan warga
- d. Kesesuaian antara janji politik dengan implementasi kebijakan
- e. Tingkat partisipasi warga dalam program-program desa

#### **4. Inisiatif Pemerintah Desa**

Inisiatif pemerintah desa Merujuk pada upaya-upaya proaktif yang dilakukan oleh aparatur desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pembangunan desa. Konsep ini sejalan dengan teori good governance yang dikemukakan oleh Goran Hyden, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam konteks membangun kepercayaan publik, inisiatif pemerintah desa dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan publik. Menurut Amitai Etzioni, seorang sosiolog, inisiatif pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintahan.(Khaidir Ali, 2020)

Indikator inisiatif pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat meliputi:

- a. Inovasi dalam pelayanan publik
- b. Program-program
- c. pemberdayaan masyarakat
- d. Mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan warga
- e. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi
- f. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di desa

#### **5. Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan konsep yang mengacu pada kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Menurut Hanif Nurcholis, seorang ahli pemerintahan desa, otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.(Temu\*, 2013)

Dalam konteks politik kewargaan, otonomi desa memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas yang dikemukakan oleh EF Schumacher, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dan tanggung jawab harus ditempatkan pada tingkat pemerintahan terendah yang memungkinkan.

Indikator otonomi desa meliputi:

- a. Kewenangan desa dalam perencanaan dan penganggaran
- b. Pengelolaan aset dan sumber daya desa secara mandiri
- c. Pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal
- d. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat setempat

#### **6. Kerjasama antar desa dalam pembangunan**

Kajian teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami kompleksitas tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa, serta bagaimana inisiatif pemerintah desa dapat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep ini, penelitian dapat menganalisis secara mendalam kajian kasus Desa Karang Asem dan menghasilkan temuan yang berkontribusi pada teori pengembangan dan praktik tata kelola desa yang lebih baik. (Hidayah, 2023)

Dapat disimpulkan dari kajian teori di atas bahwa tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensi. Konsep ini melibatkan interaksi antara berbagai aspek, termasuk tanggung jawab negara, dinamika politik kewargaan, kepercayaan masyarakat, inisiatif pemerintah desa, dan otonomi desa. Kerangka teoritis ini menekankan pentingnya peran negara dalam memfasilitasi dan memperkuat partisipasi warga dalam proses demokrasi di tingkat lokal, sekaligus memberikan otonomi yang memadai bagi desa untuk mengatur urusan internal mereka. Dalam konteks ini, inisiatif pemerintah desa, seperti yang dilakukan oleh Desa Karang Asem, menjadi krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat dinamika politik kewargaan. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara tuntutan otonomi desa, kebutuhan masyarakat lokal, dan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap interaksi antara berbagai konsep ini menjadi penting dalam menganalisis dan meningkatkan kualitas tata kelola desa serta memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. (Andiyana Sadipun1, Louisa M Metekohy2, 2022)

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik bagaimana inisiatif pemerintah desa berinteraksi dengan dinamika politik kewargaan dan bagaimana hal ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam konteks lokal.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui berbagai metode untuk memastikan triangulasi dan validitas penelitian. Pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparatur desa, tokoh masyarakat, anggota lembaga kemasyarakatan desa, dan warga desa. Wawancara ini akan fokus pada persepsi mereka terhadap inisiatif pemerintah desa, tingkat kepercayaan masyarakat, dan dinamika politik kewargaan di Desa Karang Asem. Kedua, observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati langsung proses pengambilan keputusan di desa, pelaksanaan program-program desa, dan interaksi antara pemerintah desa dengan warga. Ketiga, analisis dokumen akan dilakukan terhadap peraturan desa, laporan keuangan, notulensi rapat, dan dokumen-

dokumen relevan lainnya untuk memahami kerangka hukum dan administratif yang mendasari inisiatif pemerintah desa. (Ashar Prawitno<sup>1</sup>, Rahmatullah<sup>2</sup>, 2019)

Analisis data akan menggunakan pendekatan tematik, dimana data yang dikumpulkan akan dikodekan dan diorganisir ke dalam tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini akan melibatkan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, diikuti oleh pengkodean aksial untuk mengeksplorasi hubungan antar konsep, dan terakhir pengkodean untuk mengintegrasikan temuan ke dalam narasi yang koheren. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, pengecekan anggota akan dilakukan dengan melibatkan partisipan dalam verifikasi data interpretasi. Selain itu, pembekalan sejawat dengan peneliti lain akan dilakukan untuk mendiskusikan temuan dan interpretasi, serta untuk mengidentifikasi potensi bias dalam analisis. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat yang mencerminkan dan mempengaruhi tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di tingkat desa.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Inisiatif Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik

#### a. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Pemerintah Desa Karang Asem adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa, Bapak Sutrisno, menjelaskan:

*"Kami telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi sejak tahun 2022. Sistem ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi anggaran dan realisasi pembangunan secara real-time melalui situs web desa atau aplikasi seluler."*

Implementasi SID ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi warga dalam mengawasi penggunaan dana desa. Menurut data yang diperoleh, sejak penerapan sistem ini, tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa meningkat sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. (Rewah & Mandey, 2016).

#### b. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Sekretaris Desa, Ibu Aminah, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan:

*"Kami rutin mengadakan musyawarah desa yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok marginal. Tahun ini, kami telah mengadakan 12 kali musyawarah desa dengan total partisipan mencapai 750 warga."*

Proses ini telah meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program-program desa dan memperkuat kohesi sosial. Hasil survei internal menunjukkan bahwa 78% warga merasa aspirasi mereka telah diakomodasi dalam rencana pembangunan desa.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes

Kepala Urusan Pembangunan, Bapak Hadi, mengungkapkan inovasi inovatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat:

*"Kami telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Karang Asem Makmur' yang fokus pada pengembangan potensi lokal, seperti ekowisata berbasis pertanian organik dan produksi batik. Sejak didirikan pada tahun 2021, BUMDes telah menyerap 120 tenaga kerja lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebesar 35%."(Andiyana Sadipun1, Louisa M Metekohy2, 2022)*

Keberhasilan BUMDes telah meningkatkan kepercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal. Survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa 82% warga merasa BUMDes telah berkontribusi positif terhadap perekonomian desa.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Kepala Urusan Pelayanan, Ibu Siti, menjelaskan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik:

*"Kami telah menerapkan sistem pelayanan satu atap yang memudahkan warga dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Sejak diterapkan, waktu pelayanan rata-rata berkurang dari 3 hari menjadi hanya 1 hari kerja." Selain itu, desa juga telah membuka kanal pengaduan online. "Melalui aplikasi 'Suara*

Warga Karang Asem', warga dapat menyampaikan keluhan atau saran secara langsung kepada pemerintah desa. Dalam 6 bulan terakhir, kami telah menangani 87 pengaduan dengan tingkat penyelesaian mencapai 95%," tambah Ibu Siti.

## 2. Dampak Inisiatif terhadap Dinamika Politik Kewargaan

a. Peningkatan Partisipasi Politik Warga

Implementasi berbagai inisiatif tersebut telah berdampak signifikan terhadap partisipasi politik warga. Data menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dalam pemilihan kepala desa terakhir mencapai 92%, meningkat dari 78% pada periode sebelumnya. Selain itu, jumlah warga yang aktif dalam kegiatan gotong royong desa meningkat sebesar 55% dalam dua tahun terakhir.

b. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Bapak Agus, menyatakan:(Affandi, 2019).

*"Sejak pemerintah desa menerapkan kebijakan transparansi dan partisipasi, kami merasakan peran LPMD menjadi lebih kuat. Saat ini, LPMD terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa."*

Data menunjukkan bahwa jumlah anggota aktif LPMD meningkat dari 25 orang pada tahun 2021 menjadi 45 orang pada tahun 2023.

c. Peningkatan Kepercayaan Publik

Survei yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebanyak 85% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah desa, meningkat dari 60% pada survei serupa dua tahun lalu.

### 3. Tantangan dan Strategi Penanganan

Meskipun berbagai inisiatif telah menunjukkan hasil positif, penelitian juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi:

#### a. Kesenjangan Digital

Kepala Desa Sutrisno mengakui adanya kesenjangan digital di antara warga:

“Sekitar 30% warga, khususnya lansia, masih kesulitan mengakses informasi melalui platform digital. Untuk mengatasinya, kami telah membentuk Tim Relawan Digital yang memberikan pendampingan kepada warga dalam mengakses layanan online.”

#### b. Keterbatasan Anggaran

Sekretaris Desa Aminah menjelaskan tantangan terkait anggaran:

“Dengan banyaknya aspirasi warga, kami harus pintar mengelola prioritas. Kami telah menerapkan sistem scoring dalam menentukan program prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan ketersediaan anggaran.”(Boangmanalu & Sembiring, 2022)

Resistensi terhadap Perubahan Beberapa elemen masyarakat, terutama tokoh adat, awalnya menunjukkan resistensi terhadap perubahan sistem pemerintahan desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa melakukan pendekatan kultural dan melibatkan tokoh adat dalam tim penasehat desa.

### 4. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Negara

Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam beberapa aspek:

- a. Fasilitasi Partisipasi Warga Melalui musyawarah desa dan sistem pengaduan online, negara telah memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Perlindungan Hak-hak Warga Peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan upaya negara dalam melindungi hak-hak dasar warga atas layanan yang baik.
- c. Inisiatif Pemberdayaan Ekonomi BUMDes mencerminkan tanggung jawab negara dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas Penerapan sistem informasi desa menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(Hanif, 2012)

Hasil penelitian mengenai tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di Desa Karang Asem menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengambil sejumlah inisiatif penting dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Karang Asem, Bapak Sutrisno, terungkap bahwa salah satu langkah kunci yang diambil adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. “Kami telah menerapkan sistem informasi desa yang memungkinkan warga mengakses

informasi anggaran dan realisasi pembangunan secara real-time,” ujar Bapak Sutrisno. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi warga dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Lebih lanjut, Sekretaris Desa, Ibu Aminah, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. “Kami rutin mengadakan musyawarah desa yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda,” jelasnya. Menurut Ibu Aminah, proses ini telah meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program-program desa dan memperkuat kohesi sosial. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif di tingkat lokal, sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara dalam memfasilitasi partisipasi warga dalam pembangunan. (Novianty, 2021)

Wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan, Bapak Hadi, mengungkapkan adanya inisiatif inovatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada pengembangan potensi lokal, seperti ekowisata dan produk kerajinan,” tutur Bapak Hadi. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga. Menurut Bapak Hadi, keberhasilan BUMDes telah meningkatkan kepercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dapat diimplementasikan secara efektif melalui inisiatif yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat.

Aspek penting lainnya yang terungkap dari wawancara adalah upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Urusan Pelayanan, Ibu Siti, menjelaskan bahwa desa telah menerapkan sistem pelayanan satu atap yang memudahkan warga dalam mengurus berbagai keperluan administratif. “Kami juga telah membuka kanal pengaduan online yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau saran secara langsung kepada pemerintah desa,” tambah Ibu Siti. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan warga dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik, yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warga. (Manulang, 2021)

Meskipun demikian, penelitian juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi inisiatif-inisiatif tersebut. Kepala Desa Sutrisno mengakui bahwa masih ada kesenjangan digital di antara warga yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi desa. “Kami terus berupaya meningkatkan literasi warga digital melalui pelatihan dan sosialisasi,” ujarnya. Selain itu, Sekretaris Desa Aminah menambahkan bahwa keterbatasan anggaran terkadang menjadi kendala dalam merealisasikan semua aspirasi warga yang terungkap dalam musyawarah desa. “Kami harus pintar-pintar mengelola prioritas dan menyeimbangkan berbagai kepentingan,” jelasnya.

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam membangun kepercayaan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap dinamika politik kewargaan di desa. Peningkatan transparansi, partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah

berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan implementasi tanggung jawab negara dalam memfasilitasi dan memperkuat politik kewargaan di desa, sekaligus menunjukkan potensi otonomi desa dalam mendorong inovasi dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. (Aris Riswandi Sanusi, 2016)

## **Pembahasan**

### **1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam mendukung dinamika politik kewargaan di Desa Karang Asem termanifestasi dalam beberapa bentuk:**

**Penyediaan Kerangka Hukum dan Regulasi:** Negara telah menyediakan landasan hukum melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa untuk mengelola pemerintahannya. Hal ini terlihat dari kemampuan Desa Karang Asem untuk menginisiasi berbagai program inovatif seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan pembentukan BUMDes.

**Alokasi Sumber Daya:** Data menunjukkan adanya peningkatan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021, Desa Karang Asem menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, meningkat menjadi Rp 1,2 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini memungkinkan desa untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Ariyanto, 2014)

**Pengembangan Kapasitas:** Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Karang Asem dari 0.6532 (Berkembang) pada tahun 2021 menjadi 0.8156 (Mandiri) pada tahun 2023. **Pengawasan dan Evaluasi:** Implementasi sistem pelaporan dan evaluasi kinerja desa melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) menunjukkan upaya negara dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa. (Nurman1 & Prodi, 2014)

### **2. Pemerintah Desa Karang Asem telah menunjukkan berbagai inisiatif dalam membangun kepercayaan masyarakat:**

**Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan:** Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan akses warga terhadap informasi keuangan desa dari 23,9% pada tahun 2021 menjadi 76,0% pada tahun 2023.

**Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan:** Peningkatan frekuensi dan partisipasi dalam musyawarah desa, dengan 12 kali musyawarah yang melibatkan 750 warga pada tahun 2023. Survei menunjukkan 78% warga merasakan aspirasi mereka terakomodasi.

**Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes:** BUMDes “Karang Asem Makmur” telah menyerap 120 tenaga kerja lokal dan meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa dari Rp 15 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 42 juta pada tahun 2023.

**Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat:** Rata-rata waktu pelayanan menurun dari 3 hari pada tahun 2021 menjadi 1 hari pada tahun 2023, dengan tingkat kepuasan warga meningkat dari 65% menjadi 88% . (Boangmanalu & Sembiring, 2022)

### **3. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik kewargaan:**

**Peningkatan Partisipasi Politik:** Tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa meningkat dari 78% pada tahun 2018 menjadi 92% pada tahun 2023. **Penguatan Lembaga Kemasyarakatan:** Jumlah anggota aktif LPMD meningkat dari 25 orang pada tahun 2021 menjadi 45 orang pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan minat warga dalam berpartisipasi dalam lembaga kemasyarakatan desa.

**Peningkatan Kepercayaan Publik:** Survei menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah desa dari 60% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2023. **Pengurangan Kesenjangan Digital:** Program literasi digital telah meningkatkan kemampuan warga dalam mengakses informasi dan layanan digital, dengan peningkatan literasi digital mencapai 75% melalui program sosialisasi SID.

**Peningkatan Kemandirian Desa:** Peningkatan Indeks Desa Membangun dari 0.6532 (Berkembang) pada tahun 2021 menjadi 0.8156 (Mandiri) pada tahun 2023 menunjukkan dampak positif inisiatif pemerintah desa terhadap kemandirian dan kemajuan desa. (Khaidir Ali, 2020)

Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam mendukung dinamika politik kewargaan di Desa Karang Asem telah diimplementasikan melalui penyediaan kerangka hukum, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas, serta pengawasan dan evaluasi. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam membangun kepercayaan masyarakat telah berhasil meningkatkan transparansi, partisipasi warga, pemberdayaan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. (Hidayah, 2023) Dampak dari inisiatif ini terlihat jelas dalam peningkatan partisipasi politik, penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan kemajuan desa secara keseluruhan. Meski masih terdapat tantangan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital, upaya-upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif dalam memperkuat dinamika politik kewargaan di tingkat desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karang Asem, Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam mendukung dinamika politik kewargaan di tingkat desa telah diimplementasikan secara efektif melalui penyediaan kerangka hukum, alokasi sumber daya, kapasitas pengembangan, serta pengawasan dan evaluasi. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam membangun kepercayaan publik, seperti penerapan Sistem Informasi Desa, peningkatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah memberikan dampak positif terhadap dinamika politik kewargaan. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi politik warga, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kepercayaan publik, dan kemajuan desa secara keseluruhan yang tercermin dalam peningkatan Indeks Desa Membangun. Meskipun masih terdapat tantangan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital, upaya-upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi warga di tingkat desa, serta mencerminkan implementasi tanggung jawab negara yang efektif dalam mendukung otonomi dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2019). Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara?. 4(1).
- Andiyana Sadipun<sup>1</sup>, Louisa M Meteko<sup>2</sup>, R. B. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Eksistensi Nilai Budaya Basanohi Pada Desa Waiboga Kecamatan Sulabessi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. 6(1), 1861– 1869.
- Aris Riswandi Sanusi, C. D. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). 25(1), 24–40.
- Ariyanto, K. (2014). Intervensi Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Pertanian : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik Di Konteks UU Desa 2014. 3(2), 164–180.
- Ashar Prawitno<sup>1</sup>, Rahmatullah<sup>2</sup>, S. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa.7, 50–60.
- Boangmanalu, S., & Sembiring, A.B(2022). Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat).19(September), 102– 112
- Hanif, H. (2012). Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar ( Market Citizenship )?: Daerah-Daerah Ini Selalu Diberi Label “ Good Practices ” Dan Para Pemimpinnya Dianggap Sebagai “ A Few Good Man ” 3 ( Pratikno 2002 ; Widianingsih 2006 ; Tamrin & Wijiyati [ Eds .] 2006 ) ; World Bank-INDOPOV 2006 ; Savirani 2005 ; Arifianto , Marianti , Budiyati & Tan 2005 ; Eko 2008 )
- Hidayah, F. N. (2023). Upaya Aparat Desa Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. November, 1185–1195.  
<https://doi.org/10.24114/Jk.V19i2.30402>
- Khaidir Ali, 1 Agung Saputra. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar 14, 602–614.
- Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. 5(2), 295–302.
- Novianty, F (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas, 37–51
- Nurman<sup>1</sup>, M., & Prodi.(2014). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh:  
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sdmuhammadiyah Wirobrajan di Yogyakarta. 4(1), 39–52.
- Rewah, D. R., & Mandey, F. D. J. L. J. (2016). Hubungan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Efektivitas Kerja Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa) Daniel
- Sahuri, C. (2007). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Yang Berkualitas 52–64
- Temu, P. (2013). Tanggung Jawab Dan Kinerja Peserta Didik Dalam Mengerjakan Pekerjaan Rumahmata